



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511  
[pn Sleman@yahoo.co.id](mailto:pn Sleman@yahoo.co.id), <http://pn-sleman.go.id>

Nomor : 1125/KPN.W13.U2/HM1.1/1/2026 Sleman, 21 Januari 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pengiriman Laporan Tahunan Informasi

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13  
Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Ringkasan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Tahun 2024 (data terlampir) berdasarkan Lampiran I XV Huruf A Nomor 2 SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Negeri Sleman,



WARI JUNIATI, S.H., M.H.

LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII2022  
TANGGAL : 30 Agustus 2022



**PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511

Telepon/Faksimile: (0274) 868401, Surel: pnsleman@yahoo.co.id

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI**

**Periode: Januari- Desember 2025**

**A. RINGKASAN LAPORAN**

Layanan informasi Pengadilan Negeri Sleman pada Tahun 2025 teregister sebanyak 3649 permohonan yang terdiri dari 126 layanan permohonan informasi khusus mengenai salinan dan petikan putusan dan 3523 permohonan informasi lainnya. Permohonan informasi ini diproses dari sejumlah perantara, antara lain aplikasi SISALPUT (Sistem Informasi Salinan Putusan), persuratan, telepon, WhatsApp, dan lain-lain. Selain itu sudah terlayani semua permohonan surat keterangan berkaitan dengan perkara yang didaftarkan melalui eraterang (<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/>) sejumlah 1507 permohonan.

Salah satu pendukung pelayanan informasi yang sudah dijalankan adalah adanya sarana dan prasarana yang membantu jalannya pelayanan Informasi. Terutama aplikasi yang berperan langsung dalam pelayanan. Aplikasi seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 6.0.1 sudah terkoneksi dengan aplikasi e-Berpadu untuk perkara Pidana dan e-Court untuk perkara Perdata serta aplikasi lainnya seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Hal ini tentu memudahkan pengguna mendapatkan informasi secara *real time*. Selain itu, aplikasi SISALPUT yang merupakan hasil inovasi dari Pengadilan Negeri Sleman juga sengaja dibuat untuk memudahkan pemohon dalam mengajukan permohonan informasi berupa salinan putusan.

LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII2022  
TANGGAL : 30 Agustus 2022

Sampai akhir tahun 2025, perkara yang masuk sudah mencapai 100% untuk perkara baru meliputi perkara pidana dan perdata secara keseluruhan. Pada akhir periode tahun 2025, presentase penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Sleman mencapai 92,5%. Apabila dilihat dari kuantitas perkara, total perkara tahun 2025 untuk perkara pidana biasa sejumlah 736 perkara, pidana singkat sejumlah 18 perkara, pidana cepat sejumlah 360 perkara, pidana lalu lintas sebanyak 13.260 perkara, pidana anak sejumlah 35 perkara, dan pidana praperadilan sebanyak 13 perkara. Sedangkah untuk perkara perdata antara lain: perdata gugatan sebanyak 325 perkara, perdata permohonan sebanyak 1223 perkara, perkara gugatan sederhana sebanyak 41 perkara, perlawanan (*derden verzet*) sebanyak 4 perkara, dan perdata konsinyasi sebanyak 3 perkara. Disamping itu, total dari tunggakan perkara pada tahun 2024 berjumlah 317 perkara.

Layanan Informasi juga telah tersedia pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pengadilan secara *offline* maupun online. Aplikasi PTSP yang memungkinkan setiap pengguna layanan tertib dengan adanya sistem antre. Tercatat pada tahun 2025, pengguna layanan PTSP yang teregister dalam sistem antrian berjumlah 5149 tamu. Jika dihitung perbulannya, maka rata-rata per bulannya sejumlah 429 orang pengguna yang telah mengambil antrian. Sedangkan untuk buku tamu yang tercatat, ada sebanyak 5132 tamu telah datang ke Pengadilan Negeri Sleman.

Pelayanan informasi secara offline dilaksanakan oleh staf pada meja informasi. Hal yang ditekankan dalam pelayanan informasi dengan mengedepankan metode 5S (Senyum, Sapa, Salam Sopan, dan Santun. Metode ini tidak hanya diperuntukkan untuk petugas pada meja informasi, tetapi juga untuk seluruh stakeholder di Pengadilan Negeri Sleman. Proses ini masih terus berjalan karena tantangan terberat adalah merubah cara berpikir sehingga dalam setiap kesempatan briefing selalu ditekankan tentang penerapan 5S.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI**

### **1. Sarana dan Prasarana**

Berikut sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Sleman yang menunjang layanan informasi:

**Perangkat Keras/ *hardware***

- 1 (satu) buah komputer server dengan SO Windows Server 2008.
- 2 (dua) buah komputer server dengan SO Linux centos 7.0 dan debian 11
- 1 (satu) buah kiosk touch screen terletak di lobby.
- 1 (satu) komputer di informasi persidangan untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum.
- 5 (lima) buah LCD monitor di gedung utama.
- 1 (satu) buah perangkat jaringan internet dengan bandwith 200 Mbps.
- 1 (satu) buah perangkat sistem CCTV dan perekaman pada gedung Pengadilan Anak.
- 5 (lima) buah printer-scanner.
- 19 (sembilan belas) buah notebook untuk update data perkara oleh Panitera Pengganti.
- 15 (lime belas) buah notebook untuk sidang hakim.
- 6 (enam) buah komputer desktop pada meja PTSP.
- 4 (empat) buah komputer desktop pada pelayanan mandiri.
- 1 (satu) komputer pelayanan disabilitas.
- 1 (satu) buah televisi.

**Sarana dan Prasarana perangkat lunak/ *software***

- Aplikasi SIPP.
- Aplikasi Monitoring SIPP.
- Aplikasi Sistem Manajemen Elektronik Terintegrasi (SIMETRI) (sejak Oktober 2025) digunakan untuk persuratan.
- Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) (sejak Oktober 2017) digunakan pula untuk permohonan surat keterangan.
- Aplikasi Antrian Layanan PTSP (sejak November 2018).

- Aplikasi Antrian sidang.
- Aplikasi buku tamu.
- Aplikasi registrasi pendaftaran surat kuasa dan badan hukum.
- Aplikasi SISALPUT (sejak tahun 2021).
- Sistem Operasi Windows XP, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 11, dan Linux.

**Sarana dan Prasarana *software* yang secara langsung berkaitan**

- Aplikasi Direktori Putusan ([www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id))
- Aplikasi Siwas (<http://siwas.mahkamahagung.go.id>)
- Aplikasi E-Court (<http://ecourt.mahkamahagung.go.id>)
- Aplikasi SIPP ([sipp-ma.mahkamahagung.go.id](http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id))
- Aplikasi [komdanas.mahkamahagung.go.id](http://komdanas.mahkamahagung.go.id)
- Aplikasi [simari.mahkamahagung.go.id](http://simari.mahkamahagung.go.id)

**Sarana Media Sosial Pengadilan Negeri Sleman**

1. Website <http://pn-sleman.go.id>
2. **Instagram** Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sleman telah menyediakan akun Instagram sebagai media informasi resmi dengan tujuan agar masyarakat mudah mengakses informasi melalui media sosial Instagram, masyarakat bisa mengikuti akun Instagram Pengadilan Negeri Sleman dengan nama akun **@pn\_sleman**.
3. **Facebook** Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sleman telah menyediakan akun Facebook sebagai media informasi resmi dengan tujuan agar masyarakat mudah mengakses informasi melalui media social Facebook, masyarakat bisa mengikuti akun Facebook Pengadilan Negeri Sleman dengan nama akun **Pengadilan Negeri Sleman**.
4. **Youtube** Pengadilan Negeri Sleman dengan akun **@PengadilanNegeriSleman**

### **Sarana komunikasi Pengadilan Negeri Sleman**

1. Surat disampaikan dengan alamat:

Pengadilan Negeri Sleman Jl. KRT. Pringgodingrat No 1, Beran, Tridadi Sleman, D I Yogyakarta 55511

2. Email: [pnsleman@yahoo.co.id](mailto:pnsleman@yahoo.co.id)
3. Telp/Fax: 0274-868401
4. Hotline informasi dan pengaduan pada nomor **08112948822**

Selain yang disebut di atas, sarana pendukung lainnya antara lain bagan-bagan informasi, *leaflet* PTSP, Kepaniteraan Hukum, Perdata, dan Pidana serta layanan prioritas, Informasi tentang tata cara memperoleh bantuan hukum, informasi tentang tata cara memperoleh pelayanan informasi, serta informasi tentang tata cara mengajukan pengaduan.

### **2. Sumber Daya Manusia**

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Sleman memiliki total 78 pegawai dengan rincian 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 16 orang Hakim, 1 orang Panitera, 16 orang Panitera dan Panitera Pengganti, 5 orang Juru Sita, 4 Juru Sita Pengganti, 1 orang Sekretaris, 3 orang Pejabat Kesekretariatan, 4 orang Pejabat Fungsional, dan 23 orang staf.

Khusus dalam bidang Informasi didukung oleh 3 orang ahli di bidang teknologi informasi yang terdiri atas 3 orang di kesekretariatan dengan pendidikan 1 orang Sarjana Informatika dan 1 orang Diploma Komputer, sedangkan di kepaniteraan didukung dengan 1 orang yang ahli di bidang teknologi informasi dengan pendidikan sarjana Teknik informatika.

### **3. Anggaran**

Layanan informasi tidak dianggarkan secara khusus. Secara umum, layanan informasi dianggarkan melalui DIPA 01. Ada pun permohonan informasi berupa salinan putusan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan pada SK KMA 2- 144/KMA/SK/VIII/2022.

**C. DATA PELAYANAN INFORMASI**

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-Rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	137	3 hari/ permohonan	127	0	10	0	1	9
Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengawasan & Pendisiplinan	0	0	0	0	0	0	0	0
Anggaran & Aset	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainnya	3523	1 hari/ permohonan	3523	0	0	0	0	0
<b>Total****</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

\* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan

\*\* Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon(jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak)

\*\*\* Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (mlsal masih diketik), atau alasan lain.

\*\*\*\* Jumlah total dari masing-masing kolom.

**D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan*	Tanggapan Alasan PPID atas Penolakan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengawasan & Pendisiplinan	0	0	0	0	0	0	0	0
Anggaran & Aset	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total****</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Diisi dengan jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID

\*\* Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi

\*\*\* Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

\*\*\*\* Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal

\*\*\*\*\* Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

\*\*\*\*\* Jumlah total dari masing-masing kolom.

LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII2022  
TANGGAL : 30 Agustus 2022

#### **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI**

Kendala eksternal yang dihadapi yaitu banyak data informasi yang telah diproses tetapi tidak diambil oleh pemohon informasi meskipun pemohon telah diberi pemberitahuan melalui WhatsApp.

Kendala internal yang dialami adalah tidak pahamnya para petugas yang terlibat mengenai prosedur layanan pemberian informasi berdasarkan SK KMA 2-144/KMA/SKNIII/2022.

#### **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.**

Sebagai rekomendasi perlu diadakannya optimalisasi sosialisasi SK KMA 2-144/KMA/SKNIII/2022 di setiap bagian yang terlibat secara intensif agar terbentuknya kesepahaman mengenai prosedur pemberian informasi.

Selanjutnya sebagai rencana tindak lanjut, perlu diadakannya optimalisasi melalui briefing mengenai prosedur pemberian informasi berdasarkan SK KMA 2-144/KMA/SKNIII/2022 dari awal hingga akhir layanan.

Sleman, 21 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



R. RUDI HARSOJO, S.H.  
Panitera Muda Hukum